

Intervensi China dalam Mediasi Perdamaian Arab Saudi dengan Iran

China's Intervention in Saudi Arabia's Peace Mediation with Iran

Canta Bayu Laksana^{1*}, Peni Hanggarini²
Paramadina Graduate School Of Diplomacy¹²
Canta.Laksana@students.paramadina.ac.id*

Diterima 10 Juli 2025 | Direvisi 22 Desember 2025 | Diterbitkan 25 Desember 2025

ABSTRACT

This paper aims to analyze China's intervention in mediating peace between Saudi Arabia and Iran. The discussion focuses on China's soft power strategy as a mediator between these two Middle Eastern countries, which have long experienced tense relations. This issue is considered significant, as the success of the mediation not only affects regional stability but also reflects shifting global power dynamics and highlights China's growing role in international geopolitics. The research adopts a qualitative method, employing Joseph Nye's soft power theory as an analytical framework to understand how China builds its influence through non-coercive means, particularly economic cooperation and diplomacy. Data were collected through literature review and analyzed using descriptive qualitative techniques. The findings indicate that China's success as a mediator is largely attributed to its economic diplomacy and neutral stance, which fostered trust from both parties. These results underscore the importance of soft power in expanding global influence and present a viable alternative to conflict resolution that does not rely on military force. This study contributes to the field of international relations and Middle Eastern geopolitics by emphasizing the necessity of strengthening non-coercive diplomacy as a means to maintain regional stability and build long-term peace.

Keywords: China, Soft Power, Saudia Arabia, Iran, Middle east

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis intervensi China dalam mediasi perdamaian Arab Saudi dengan Iran. Topik yang dibahas berfokus pada strategi soft power China sebagai mediator antara dua negara di Timur Tengah, yakni Arab Saudi dan Iran, yang telah lama berada dalam kondisi hubungan yang tegang. Hal ini dinilai penting mengingat keberhasilan mediasi ini tidak hanya berdampak pada stabilitas regional, tetapi juga mencerminkan perubahan dinamika kekuatan global serta meningkatnya peran China dalam isu geopolitik internasional. Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori soft power dari Joseph Nye sebagai kerangka analisis untuk

memahami bagaimana China membangun pengaruhnya secara non-koersif melalui kerja sama ekonomi dan diplomasi. Data dikumpulkan melalui pengumpulan data dan menggunakan studi literatur, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan China sebagai mediator didukung oleh diplomasi ekonomi dan posisi netral yang membangun kepercayaan kedua pihak. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi soft power dalam memperluas pengaruh global dan menawarkan alternatif penyelesaian konflik tanpa kekuatan militer. Penelitian ini berkontribusi pada studi hubungan internasional dan geopolitik Timur Tengah dengan menekankan pentingnya diplomasi non-koersif untuk menjaga stabilitas dan perdamaian jangka panjang.

Kata kunci: *China, Soft Power, Mediator, Arab Saudi, Timur Tengah*

PENDAHULUAN

Konflik antara Arab Saudi dan Iran telah menjadi salah satu konflik regional yang paling kompleks dan berkepanjangan di Kawasan Timur Tengah. Konflik ini memiliki akar yang mendalam dan melibatkan berbagai faktor, termasuk perbedaan agama, perbedaan politik, persaingan kekuasaan, dan ambisi regional. Sudah banyak aktor yang berupaya mendamaikan kedua negara tersebut salah satunya adalah Indonesia. Faktor yang membuat perhatian Indonesia di Timur Tengah terutama dalam mendamaikan Arab Saudi dan Iran adalah kedekatan emosional dimana Indonesia memiliki latar belakang agama yang sama dengan negara – negara di Timur Tengah (Karimah, 2017). Namun dari sekian banyak upaya perdamaian yang dilakukan dari mulai pendekatan politik sampai pendekatan emosional keagamaan yang dilakukan oleh berbagai pihak tidak membuahkan hasil yang memuaskan.

Tetapi pada 10 Maret 2023 di Beijing, Arab Saudi dan Iran sepakat untuk memulihkan kembali hubungan diplomatiknya setelah terputus selama 7 tahun terakhir akibat perang di Yaman. Kesepakatan tersebut dihadiri oleh diplomat senior China Wang Yi sebagai perwakilan dari pemerintah China. Kesepakatan ini mengejutkan banyak pihak dikarenakan upaya diplomasi China yang dilakukan secara senyap dan tidak diketahui oleh dunia internasional. Pemerintah China menyampaikan bahwa telah terjadi perundingan intensif sebelumnya dari 6 Maret hingga 10 Maret antara delegasi Iran yang dipimpin oleh Sekretaris Jendral Dewan Tinggi Kemanan Nasional Ali Shamkhani dan delegasi Arab Saudi yang dipimpin Menteri Negara dan Penasihat Keamanan Nasional Arab Saudi Musaed Bin Mohammed Alaiban di Beijing (Kompas, 2023).

Keberhasilan China dalam memediasi perdamaian antara Iran dan Arab Saudi bukanlah hasil dari upaya singkat sebagaimana disampaikan oleh pemerintahnya, melainkan merupakan buah dari proses panjang yang telah dirintis selama bertahun-tahun melalui strategi diplomasi berbasis *soft power*. Sejak tahun 2007, Kongres Nasional Partai Komunis China telah menyatakan bahwa *soft power* akan menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional di berbagai kawasan (Yulianti dan Affandi, 2018). China menyadari bahwa pertumbuhan ekonominya yang pesat perlu diiringi dengan pencitraan global yang positif. Untuk itu, berbagai studi tentang konsep *soft power* telah dilakukan, guna menunjukkan kepada dunia bahwa kebangkitan China bersifat damai dan tidak mengancam kedaulatan negara lain.

E.H. Carr sejak 1939 membagi kekuatan internasional ke dalam tiga kategori: kekuatan militer, ekonomi, dan pengaruh terhadap opini publik (Nye, 2004). Dalam konteks ini, *soft power* menjadi instrumen strategis bagi China untuk membangun citra dan menarik simpati publik di berbagai negara, sehingga kerja sama dengan China dapat diterima secara terbuka. China kemudian mengembangkan konsep *soft power* ala Joseph Nye dengan menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya institusional dan nilai-nilai nasional. Osman (2017) menyebutkan bahwa terdapat enam elemen utama yang menjadi sumber *soft power* China, yakni keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, keterlibatan dalam berbagai perjanjian internasional, diplomasi yang canggih, reputasi yang baik dalam forum global, integrasi nasional yang kuat, serta kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, hubungan baik yang dibangun oleh China terhadap Kawasan Timur Tengah sudah sejak lama dibangun khususnya Arab Saudi dan Iran. China secara luas dipandang sebagai kekuatan non-intervensionis yang kredibel karena konsistensinya dalam menghormati kedaulatan internal negara-negara di Timur Tengah tanpa mencampuri urusan politik domestik mereka (Sun, 2024). Kepercayaan ini menjadikan China sebagai penyeimbang strategis yang mampu mengisi kekosongan peran di tengah pergeseran fokus Amerika Serikat melalui kebijakan *Pivot to Asia* (Eslami & Papageorgiou, 2023). Hal ini memungkinkan China untuk membangun kepercayaan dengan kedua negara dan menjalankan peran mediator dengan objektivitas. Hubungan baik yang dibangun bukan hanya semata untuk membuat citra kebangkitan damai oleh China di mata internasional melainkan berbagai kepentingan yang dimiliki oleh China khususnya di negara Arab Saudi dan Iran. Kedua negara tersebut merupakan produsen minyak terbesar di dunia, dan China merupakan salah satu konsumen terbesar minyak. Keberhasilan dalam memediasi konflik antara Arab Saudi dan Iran dapat

mengamankan pasokan minyak yang vital bagi perekonomian China sekaligus menguntungkan kedua negara tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis intervensi perdamaian yang dilakukan oleh China terhadap Arab Saudi dan Iran, yang memungkinkannya berperan sebagai mediator efektif bagi kedua negara tersebut. Peran mediator ini bukanlah hal baru bagi China; sebelumnya, Beijing telah menunjukkan rekam jejak dalam meredakan ketegangan regional, seperti saat menjadi penengah dalam konflik antara Arab Saudi dan Qatar pada tahun 2017 melalui forum *China–Arab States Cooperation Forum* (CASCF) (Chowdhury, 2018). Keberhasilan tersebut, ditambah dengan posisinya yang netral, memperkuat legitimasi China dalam mengelola dinamika politik di Timur Tengah (Al Tamimi, 2017). Selain itu, kajian ini akan membahas hubungan bilateral China dengan masing-masing negara, konflik historis Arab Saudi-Iran, serta posisi strategis China dalam memengaruhi kawasan tersebut. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong perdamaian Iran-Arab Saudi yang dimediasi oleh China guna memahami transformasi peran China dari kekuatan ekonomi menjadi aktor kunci perdamaian global berbasis *soft power*. Penelitian ini juga akan memberikan faktor – faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdamaian antara Iran dan Arab Saudi yang di mediasi oleh China.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai literatur terdahulu, dokumen, serta sumber dari media massa yang relevan dengan hubungan antara China dan Iran, serta China dan Arab Saudi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Studi ini mengandalkan beragam sumber, termasuk jurnal akademik, buku, artikel, situs web, media elektronik, serta dokumen lain yang berkaitan dengan interaksi China dengan kedua negara tersebut (Lambert, 2012).

Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan penelitian ini, konsep yang digunakan adalah konsep *public diplomacy* China yang berupa *soft power*. Dimana China menggunakan strategi *soft power* untuk memediasi perdamaian antara Arab Saudi dan Iran. Selain itu konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran akan dijelaskan melalui pendekatan teori konflik Galtung. Galtung menjelaskan bagaimana konflik bisa terjadi dan penyebabnya sekaligus memberikan

solusi atas penyelesaian konflik yang terjadi *peace and conflict*. Hasil penelitian dipaparkan dalam lima bagian, yaitu pendahuluan, kajian teoritis mengenai *soft power*, Sejarah latar belakang Konflik Arab Saudi – Iran, Analisis hubungan China dengan Arab Saudi, Ketergantungan Iran terhadap China, Penurunan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah dan Meningkatnya Pengaruh China, Peran China di Timur Tengah serta Kesimpulan.

Konflik

Konflik dapat dipahami sebagai bentuk pertentangan atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang melibatkan penggunaan kekuatan, termasuk kekuatan bersenjata, dengan tujuan untuk saling mengalahkan dan memaksakan perdamaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang menang. Ralph Dahrendorf, sebagaimana dikutip oleh Weber dan Galtung, mendefinisikan konflik sebagai suatu ketegangan dalam pengambilan keputusan yang mencakup beragam pilihan, yang kadang kala muncul dalam bentuk konfrontasi antar kelompok sosial. Sementara itu, Peter Wallensteen, dalam rujukan yang sama, melihat konflik sebagai suatu kondisi sosial di mana sedikitnya dua pihak terlibat dalam persaingan secara simultan untuk memperoleh sumber daya yang terbatas.

Secara umum, konflik juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan antara dua atau lebih pihak baik individu maupun kelompok yang memiliki atau merasa memiliki tujuan yang tidak selaras. Dalam perspektif sosiologis, konflik mencerminkan adanya pertarungan tersembunyi antara kelompok atau individu dalam suatu masyarakat atau negara-bangsa. Bentuk konflik ini bisa terjadi antara dua orang, antar kelompok sosial, gerakan sosial, kelompok kepentingan, kelas sosial, gender, organisasi, partai politik, kelompok etnis, ras, atau komunitas keagamaan.

Menurut Johan Galtung, akar utama dari konflik terletak pada perbedaan kepentingan dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing aktor. C.R. Mitchell menambahkan bahwa sumber konflik meliputi keterbatasan sumber daya, ketimpangan distribusi sumber daya, perbedaan tujuan dan kepentingan, serta perbedaan nilai-nilai sosial. Selain itu, isu-isu seperti SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), pemenuhan kebutuhan dasar manusia, rivalitas antarnegara, ketimpangan dalam sistem internasional, identitas sosial dan budaya, serta hambatan komunikasi juga dapat menjadi pemicu konflik. Oleh karena itu, esensi dari konflik terletak pada adanya ketidaksesuaian kepentingan, perbedaan sistem nilai, dan kelangkaan sumber daya.

Intervensi Perdamaian

Konsep perdamaian umumnya dikaitkan dengan resolusi konflik, yaitu suatu proses penyelesaian perbedaan tanpa melibatkan penggunaan kekerasan guna mencapai kondisi damai. Perdamaian dapat dimaknai sebagai keadaan di mana masyarakat dari latar belakang budaya, sosial, dan identitas yang beragam mampu hidup berdampingan secara harmonis. Keberagaman tersebut tidak dipandang sebagai hambatan selama terdapat kemampuan untuk menjalin komunikasi yang efektif, yang pada gilirannya mendorong terciptanya pemahaman dan toleransi antar kelompok. Dalam konteks akademik, studi mengenai perdamaian juga merefleksikan perkembangan kontemporer dalam bidang Hubungan Internasional, Studi Keamanan, hingga Ilmu Politik. Meskipun akar kajian perdamaian telah muncul sejak berakhirnya Perang Dunia II—dengan tujuan utama mencegah terulangnya perang berskala global—perkembangan yang lebih signifikan justru terjadi setelah runtuhnya Uni Soviet. Pada awalnya, kajian perdamaian berfokus pada tataran hubungan internasional, namun memasuki abad ke-21, pendekatan terhadap studi ini menjadi semakin holistik dan multidisipliner, bahkan mencakup isu-isu mikro seperti konflik interpersonal, yang juga menjadi bagian dari kajian psikologi.

Johan Galtung menyatakan bahwa perdamaian merupakan suatu keadaan yang bebas dari kekerasan, baik yang bersifat langsung maupun struktural. Ia menegaskan bahwa perdamaian sejati hanya dapat tercapai jika tidak terdapat kekerasan dan ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Galtung membedakan dua jenis perdamaian. Pertama adalah *perdamaian negatif* (*negative peace*), yang merujuk pada tidak adanya konflik terbuka antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda, tidak adanya rasa saling takut yang timpang, serta tidak adanya benturan kepentingan yang terlihat. Meski tidak terjadi perang, situasi ini belum tentu menjamin terhapusnya ketidakadilan sosial atau penindasan ekonomi. Kedua adalah *perdamaian positif* (*positive peace*), yang mencerminkan adanya mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat damai dan non-koersif, serta terbebas dari kondisi yang menindas martabat manusia. Aspek-aspek seperti terpenuhinya kebutuhan fisik (perlindungan dari kekerasan dan kelaparan) maupun psikologis (rasa aman, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat) menjadi landasan dari perdamaian jenis ini. Dengan demikian, terciptanya perdamaian positif memerlukan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan sistem politik yang inklusif.

Johan Galtung mengemukakan bahwa terdapat tiga tahapan utama dalam penyelesaian konflik, yang kemudian menjadi acuan bagi PBB dalam menjalankan perannya sebagai mediator konflik maupun dalam mengerahkan pasukan penjaga perdamaian (UN *Peacekeeping Operations*).

1. Peacemaking merujuk pada upaya mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk mendamaikan perbedaan pandangan politik dan strategi mereka, biasanya melalui proses mediasi, negosiasi, atau arbitrase, yang difokuskan pada tingkat elit atau para pemimpin.
2. Peacekeeping merupakan tahap di mana kekerasan fisik dihentikan atau dikurangi dengan keterlibatan militer yang bersikap netral dan bertugas menjaga stabilitas serta mencegah konflik kembali memanas.
3. Peacebuilding mengacu pada proses membangun kembali struktur sosial, politik, dan ekonomi pasca-konflik, dengan tujuan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan mencegah terjadinya kekerasan di masa depan.

Neoliberalisme

Mengutip dari Keohane dan Nye (1977) dalam Dugis (2018) berpendapat bahwa situasi internasional saat ini serba saling tergantung. Tergantung disini artinya saling membantu satu sama lain, bekerjasama, dimana aktor negara dan bukan negara saling bergantung satu sama lain. Terlebih di era globalisasi saat ini kerjasama antarnegara menjadi sangat penting. Alasan yang ditimbulkan negara melakukan kerjasama adalah mengutip dari Mingst (2003) dalam Dugis (2018) berpendapat bahwa adanya kondisi saling membutuhkan yang akhirnya mendorong negara saling bekerjasama secara terus menerus. Berbeda dengan neoralisme yang memandang skeptis terhadap kerjasama internasional yang anarki, sedangkan kaum neoliberalisme memandang bahwa adanya peluang kerjasama dalam institusi internasional. Dalam proses kerjasama pastinya tidak dapat berjalan dengan mudah dan akan timbul beberapa konflik, seperti friksi antarnegara dan miskomunikasi.

Soft Power

Soft power adalah kemampuan suatu negara atau entitas untuk mempengaruhi atau menarik negara lain tanpa menggunakan paksaan atau kekuatan militer (*hard power*). *Soft power* dicapai melalui daya tarik budaya, nilai-nilai politik, ideologi, dan kebijakan yang menarik bagi negara lain. Konsep ini diperkenalkan oleh Joseph Nye pada tahun 1990. Dalam

soft power, kekuatan terletak pada kemampuan untuk membuat negara lain secara sukarela mengikuti atau mengadopsi nilai-nilai, budaya, atau tujuan politik yang diinginkan tanpa adanya paksaan.

Joseph Nye mengidentifikasi tiga komponen utama dari *soft power*:

1. Budaya (*Culture*): Budaya adalah salah satu cara paling kuat untuk menyebarkan *soft power* karena orang-orang di berbagai belahan dunia sering kali tertarik atau bahkan mengadopsi elemen budaya tertentu yang dianggap menarik, seperti musik, film, bahasa, seni, mode, makanan, dan gaya hidup. Negara yang memiliki budaya populer dan disukai global dapat memperluas pengaruhnya tanpa paksaan.
2. Nilai-nilai Politik (*Political Values*): Negara-negara yang memiliki nilai-nilai politik yang kuat, seperti demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan sosial, sering kali dapat menarik simpati dan dukungan dari negara lain. Jika negara menerapkan nilai-nilai ini dengan konsisten, ia dapat meningkatkan citranya di kancah internasional.
3. Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy*): Kebijakan luar negeri yang bersifat kolaboratif, damai, dan bertujuan untuk mencapai stabilitas global juga dapat meningkatkan *soft power*. Negara yang dianggap memiliki kebijakan yang adil dan peduli pada masalah global, seperti bantuan kemanusiaan, diplomasi multilateral, dan komitmen terhadap lingkungan, cenderung dipandang positif oleh negara lain (Joseph Nye, 1990)

Pada tulisan ini akan fokus terhadap kebijakan luar negeri China khususnya kerjasama di bidang ekonomi terhadap Arab Saudi dan Iran. Kerjasama-kerjasama ekonomi yang dilakukan China di negara-negara Timur Tengah telah tumbuh pesat selama satu dekade terakhir, yang membuat pengaruh China di Timur Tengah semakin menguat. Hal ini dibuktikan dengan volume perdagangan antara China dan kawasan Timur Tengah serta Afrika Utara yang mencapai \$480,7 miliar pada tahun 2024, meningkat sekitar 80% dibandingkan tahun 2020. Secara khusus, perdagangan dengan negara-negara anggota *Gulf Cooperation Council* (GCC) melonjak hingga \$288 miliar pada tahun 2024, mencatatkan pertumbuhan sebesar 64% dalam periode sepuluh tahun terakhir.

Peningkatan tersebut berbanding terbalik dengan Amerika Serikat yang pengaruh ekonominya di kawasan tersebut semakin melemah. Neraca perdagangan Amerika Serikat terhadap negara-negara di Timur Tengah mengalami penurunan signifikan selama satu dekade terakhir. Data menunjukkan bahwa volume perdagangan AS dengan negara-negara

GCC merosot tajam sebesar 35%, dari \$120 miliar pada tahun 2014 menjadi hanya \$77 miliar pada tahun 2024. Secara keseluruhan, total nilai perdagangan negara-negara kawasan tersebut dengan China pada tahun 2021 tercatat hampir empat kali lipat lebih besar dibandingkan nilai perdagangan mereka dengan Amerika Serikat pada tahun yang sama. Dominasi ekonomi yang masif dan ketergantungan kawasan terhadap pasar Tiongkok inilah yang memperkuat strategi *soft power* China, menjadikannya kunci keberhasilan sebagai mediator perdamaian yang dipercaya dalam memediasi hubungan antara Arab Saudi dan Iran.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Konflik Arab Saudi - Iran

Konflik antara Arab Saudi dan Iran merupakan salah satu konflik regional yang paling rumit dan berkepanjangan di Timur Tengah. Akar konflik ini bersifat mendalam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perbedaan sektarian, kepentingan politik, ambisi kekuasaan, dan persaingan pengaruh regional. Arab Saudi yang menganut paham Islam Sunni, dan Iran yang berpaham Syiah, telah lama terlibat dalam kompetisi untuk mendominasi dinamika politik dan keamanan di kawasan. Kedua negara ini menggunakan pendekatan ideologis sebagai alat untuk memperluas pengaruh terhadap negara-negara lain di Timur Tengah, guna mencapai keseimbangan kekuatan yang mereka masing-masing cita-citakan (Maulana, 2018).

Setidaknya terdapat tiga faktor utama yang menjadi pendorong ketegangan antara Arab Saudi dan Iran: (1) perbedaan antara mazhab Sunni dan Syiah, (2) perebutan dominasi sebagai kekuatan regional di Timur Tengah, dan (3) dinamika politik di dalam Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) (Putra et al., 2020). Perbedaan dalam doktrin keagamaan antara Sunni dan Syiah telah menciptakan ketegangan yang berkelanjutan. Kedua negara memiliki interpretasi berbeda tentang Islam serta visi yang bertolak belakang mengenai peran negara-negara Muslim dalam memimpin kawasan. Kompetisi ini semakin tajam karena konstelasi geopolitik yang juga berbeda: Arab Saudi menjalin aliansi erat dengan negara-negara Teluk dan mendukung kelompok-kelompok Sunni, sementara Iran memperluas pengaruhnya melalui dukungan terhadap komunitas Syiah di berbagai negara.

Secara historis, konflik Arab Saudi dan Iran telah melalui sejumlah fase dalam kurun waktu satu abad terakhir (Putra et al., 2020). Fase awal terjadi pada periode 1924–1979, ketika Iran di bawah kekuasaan Mohammad Reza Pahlavi melakukan invasi terhadap wilayah

Khuzistan. Konflik berlanjut setelah revolusi Iran tahun 1979 yang mengubah struktur pemerintahan Iran menjadi republik Islam. Perubahan tersebut menantang legitimasi sistem monarki yang dianut oleh Arab Saudi, dan memperdalam ketegangan ideologis antara kedua negara. Fase terakhir dimulai sejak tahun 2003 hingga saat ini, ditandai oleh intensifikasi konflik sektarian, di mana Arab Saudi dan Iran kerap mengambil posisi yang saling berlawanan dalam berbagai krisis regional, seperti Perang Irak, konflik di Lebanon, isu teritorial Palestina–Israel yang masih berlangsung, serta keterlibatan langsung dalam konflik di Yaman (Grumet, 2015).

Pasang Surut hubungan China dan Arab Saudi

Hubungan ekonomi antara China dan Arab Saudi didorong oleh faktor-faktor penting seperti pasokan energi dan kebutuhan industri. Arab Saudi, sebagai produsen minyak terbesar di dunia, telah menjadi salah satu mitra dagang utama China dalam hal pasokan minyak mentah. China sebagai konsumen energi terbesar kedua di dunia, sangat bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energinya. Ini telah mendorong kerja sama yang erat dalam hal perdagangan minyak antara kedua negara, dengan Arab Saudi menjadi salah satu pemasok utama minyak bagi China.

Tabel 1.1 Negara Pengekspor Utama Minyak Mentah ke China Tahun 2018

Negara	Volume (Juta ton)	Kapasitas Harian (Barel/Hari)	Status
Rusia	71,49	1,6 – 1,7	Penyuplai terbesar ke pasar China.
Arab Saudi	56,73	1,43	Mitra strategis namun terhambat kebijakan pengurangan produksi OPEC.

Pada tahun 2018, volume impor minyak mentah oleh China tercatat mencapai 461 juta ton. Di antara negara-negara pemasok, Arab Saudi mengalami peningkatan signifikan dalam ekspor minyaknya ke China, yakni sebesar 56,73 juta ton, atau berkisar antara 1,6 hingga 1,7 juta barel per hari. Peningkatan ini sebagian didorong oleh kebijakan penangguhan pemotongan produksi yang disepakati dalam kerangka kerja OPEC, yang memberikan ruang bagi Arab Saudi untuk secara bertahap menstabilkan dan memperluas ekspor minyaknya ke pasar China. Dalam upaya memperkuat posisinya sebagai pemasok utama, Arab Saudi juga menjalin serangkaian kerja sama strategis dengan China, termasuk kontrak pembangunan

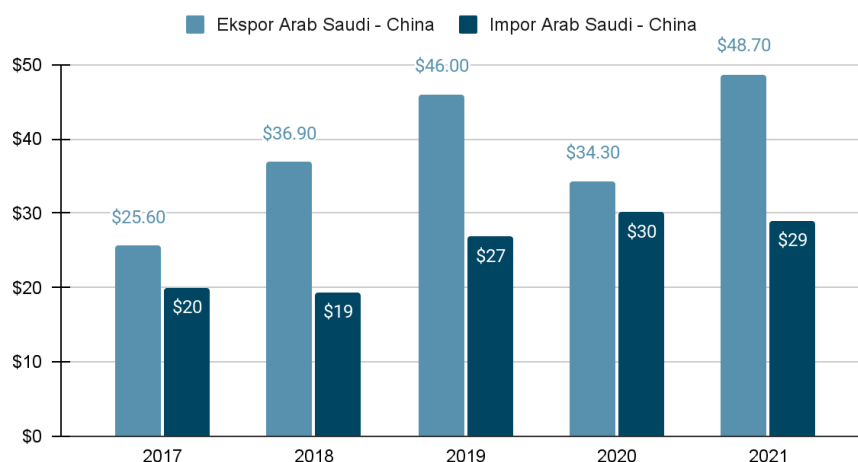
kilang minyak patungan yang dirancang untuk memenuhi permintaan energi jangka panjang dari sektor industri China. Namun demikian, Arab Saudi belum berhasil menggantikan posisi Rusia sebagai penyuplai minyak mentah terbesar ke China. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya volume impor minyak China dari Rusia yang pada tahun yang sama mencapai 71,49 juta ton, atau sekitar 1,43 juta barel per hari. Kebijakan OPEC terkait pengurangan produksi dalam tiga tahun terakhir telah berdampak pada menurunnya ekspor minyak Arab Saudi ke China. Akibatnya, China harus meningkatkan impor minyak dari Rusia dan sejumlah negara produsen lainnya guna menjamin keberlangsungan pasokan energi bagi kebutuhan industrinya (Elas, 2021).

Selain itu kedua negara ini juga telah memperkuat hubungan ekonomi mereka melalui inisiatif seperti "Visi 2030" Arab Saudi, yang bertujuan untuk mengubah ekonomi negara tersebut menjadi lebih beragam dan berorientasi ke masa depan. China telah berkomitmen untuk mendukung visi ini melalui investasi dan kerja sama dalam berbagai sektor strategis. Ini mencakup kolaborasi dalam pengembangan infrastruktur, energi terbarukan, teknologi digital, dan sektor manufaktur. Salman bin Abdulaziz melakukan kunjungan ke Beijing untuk menandatangani MoU kerjasama ekonomi antara Arab Saudi dan China pada Maret 2017. Kerjasama ini fokus pada bidang investasi minyak dan energi terbarukan dengan nilai mencapai 65 miliar USD. Selain itu, Arab Saudi dan China juga telah meningkatkan kerja sama dalam bidang perdagangan non-minyak. China merupakan mitra dagang terbesar Arab Saudi, dengan nilai perdagangan yang mencakup berbagai sektor seperti industri, teknologi, pertanian, dan infrastruktur (Mustofa, 2023). Arab Saudi, sebagai pasar yang menjanjikan bagi produk-produk China, telah menjadi tujuan investasi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan China (Yulianti dan Affandi, 2018). Selain itu, Arab Saudi juga telah berupaya untuk diversifikasi ekonominya melalui kerja sama dengan China dalam pengembangan industri dan sektor non-minyak lainnya, yang sejalan dengan strategi penyeimbangan kepentingan regional (Houghton, 2022).

Nilai perdagangan antara Arab Saudi dan China telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2000, nilai perdagangan bilateral antara Arab Saudi dan China mencapai \$3 miliar, yang didominasi oleh minyak mentah. 10 Tahun kemudian nilainya meningkat lebih dari 10 kali lipat menjadi \$41,6 miliar. Bahkan pada 6 Tahun terakhir transaksi perdagangan antara kedua negara terus meningkat. Pada **Gambar 1.1** nilai ekspor Arab Saudi ke China mencapai \$ 48,7 miliar meningkat hampir 2 kali lipat

jika dibandingkan dengan tahun 2017 yakni sebesar \$ 25,6 miliar. Nilai perdagangan kedua negara tercatat mencapai \$ 77,7 miliar pada tahun 2021

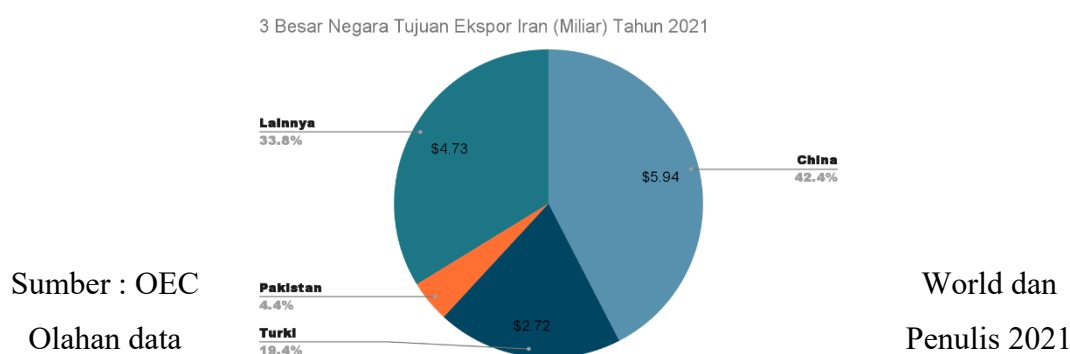
Gambar 1.1 Nilai Ekspor Impor Arab Saudi - China 2017 - 2021



Sumber : OEC World dan Olahan data Penulis

Ketergantungan Iran terhadap China

Gambar 1.2 Negara Tujuan Ekspor Iran Tahun 2021



Pada Gambar 1.2 diatas China masih menjadi negara tujuan utama ekspor bagi Iran dengan nilai transaksi ekspor mencapai \$5.9 Milyar atau menyumbang sebesar 42.4% dari nilai keseluruhan ekspor Iran disusul Turki dan Pakistan di urutan kedua dan ketiga dengan nilai masing-masing sebesar \$ 2.72 Milyar dan \$ 0.61 Milyar. Komoditas Plastik masih menyumbang nilai terbesar sebanyak 43,1% dari total nilai ekspor Iran ke China atau sebesar \$2,56 Milyar (OEC World, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa China tetap menjadi pasar terbesar dan paling menguntungkan bagi Iran, terutama dalam mendukung ketahanan ekonomi Iran di tengah tekanan sanksi internasional (Yulianti & Affandi, 2018).

Selain itu, China juga merupakan mitra investasi yang sangat penting bagi Iran. Meskipun Iran telah menghadapi sanksi ekonomi internasional yang membatasi aksesnya ke pasar global, China tetap menjadi salah satu investor terbesar di Iran. China telah berinvestasi dalam sektor energi, infrastruktur, pertanian, dan industri Iran. Menurut *The American Enterprise Institute*, China telah menginvestasikan US\$ 26.92 Milyar di Iran dari 2005 hingga 2019. Bahkan di tahun 2021 China sepakat untuk menginvestasikan \$ 400 miliar di Iran selama 25 tahun dengan imbalan pasokan minyak yang stabil untuk mendorong pertumbuhan ekonominya di bawah perjanjian ekonomi dan keamanan yang (Nytimes, 2021). Investasi China membantu Iran dalam mengatasi tekanan ekonomi dan memperkuat sektor ekonominya yang terkena dampak sanksi.

Selain hubungan ekonomi, China juga memberikan dukungan politik yang penting bagi Iran. China telah menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi Iran dari sanksi internasional yang lebih berat. Dalam praktiknya, China sering kali bertindak sebagai penyeimbang kekuatan Barat dengan menolak atau melemahkan draf resolusi yang dianggap dapat mengancam stabilitas ekonomi dan kedaulatan Iran (Mustofa, 2023). Sebagai contoh, dukungan ini terlihat nyata saat China menentang upaya Amerika Serikat untuk memperpanjang embargo senjata dan mekanisme sanksi otomatis (*snapback*) terhadap Iran, guna mengurangi tekanan politik dari negara-negara Barat (Ramadhan, 2019). China juga berupaya mempertahankan hubungan yang kuat dengan Iran di tengah tekanan politik dari negara-negara Barat. Kedua negara ini juga berbagi pandangan politik yang serupa dalam beberapa isu regional, termasuk kritik terhadap campur tangan Barat dan dukungan terhadap rezim pemerintahan.

Penurunan Pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah dan Meningkatnya Pengaruh China

Dominasi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah kini menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan. Penurunan ini tidak terlepas dari pergeseran fokus strategis kebijakan luar negeri Washington melalui kebijakan '*US Pivot to Asia*' yang diinisiasi sejak era pemerintahan Barack Obama dan diteruskan oleh administrasi selanjutnya. Fokus yang beralih ke kawasan Asia-Pasifik tersebut mengakibatkan berkurangnya keterlibatan tradisional Amerika Serikat dalam dinamika keamanan di Timur Tengah, yang pada akhirnya menciptakan celah strategis bagi aktor lain. Menurunnya peran dominan Amerika Serikat inilah yang menjadi salah satu faktor kunci yang memungkinkan China untuk mengambil

peran sebagai mediator perdamaian dalam pemulihan hubungan Arab Saudi dan Iran, dengan menawarkan pendekatan diplomasi yang lebih netral dibandingkan pendekatan konfrontasi militer. Amerika Serikat merupakan mitra dagang utama di beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Qatar. Nilai perdagangan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat telah lama menjadi hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Kedua negara ini memiliki kerja sama yang erat dalam berbagai sektor. Arab Saudi adalah salah satu mitra dagang terbesar bagi Amerika Serikat di Timur Tengah, sementara Amerika Serikat adalah salah satu pasar terbesar bagi produk minyak Arab Saudi. Perdagangan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat terutama didorong oleh pasokan minyak. Arab Saudi adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia, sementara Amerika Serikat adalah salah satu konsumen minyak terbesar.

Selain perdagangan minyak, kerja sama ekonomi antara Arab Saudi dan Amerika Serikat juga melibatkan sektor lain, termasuk industri pertahanan, infrastruktur, dan investasi. Amerika Serikat telah menjadi salah satu pemasok utama persenjataan bagi Arab Saudi, dengan kontrak senilai miliaran dolar untuk penjualan pesawat tempur, sistem pertahanan udara, dan teknologi militer lainnya. Di sektor infrastruktur, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat telah berperan dalam proyek-proyek pembangunan di Arab Saudi. Selain itu, kedua negara juga telah meningkatkan kerja sama dalam hal investasi, dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang tertarik untuk berinvestasi di berbagai sektor di Arab Saudi. Namun, pilar yang paling mendominasi hubungan bilateral ini adalah industri pertahanan, di mana Amerika Serikat tetap menjadi pemasok utama persenjataan bagi Arab Saudi melalui kontrak senilai miliaran dolar yang mencakup penjualan pesawat tempur, sistem pertahanan udara, dan teknologi militer lainnya (Putra et al., 2020).

Sejarah mencatat bahwa keterlibatan Amerika telah ada di Timur Tengah sejak perang dunia pertama dimana Amerika Serikat membantu beberapa negara Timur Tengah keluar dari sisa-sisa dominasi Kesultanan Ottoman Turki. Namun keterlibatan Amerika Serikat dalam berbagai konflik bersenjata dan penggulingan berbagai rezim dengan alasan menegakkan demokrasi, negara-negara Timur Tengah justru memandang Amerika Serikat tengah menjalankan ambisi imperialnya di Kawasan Timur Tengah. Hal ini membuat negara – negara Timur Tengah menyambut baik China karena China menunjukkan ketidaktertarikan pada proses reformasi di negara-negara Arab. Dengan kata lain, China tidak ikut campur dalam politik domestik negara-negara Timur Tengah dan sikap ini sangat diapresiasi oleh mereka (Yulianti dan Affandi, 2018).

Disisi lain China semakin memainkan peran penting di kawasan Timur Tengah. Pendekatan yang diambil China dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama dalam menavigasi dinamika politik dan tantangan keamanan yang kompleks. Keterlibatan aktif China di kawasan ini turut menarik perhatian kekuatan global lainnya, terutama Amerika Serikat. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, yang bermula sejak perubahan politik besar di Iran pada tahun 1979, menciptakan hubungan yang kurang harmonis antara kedua negara. Dalam konteks ini, hubungan antara Arab Saudi dan Iran pun turut terpengaruh, mengingat Arab Saudi merupakan sekutu strategis utama Amerika Serikat di kawasan. Di tengah situasi tersebut, China berhasil memposisikan dirinya sebagai kekuatan netral yang menjalin hubungan baik dengan kedua negara, yakni Arab Saudi dan Iran.

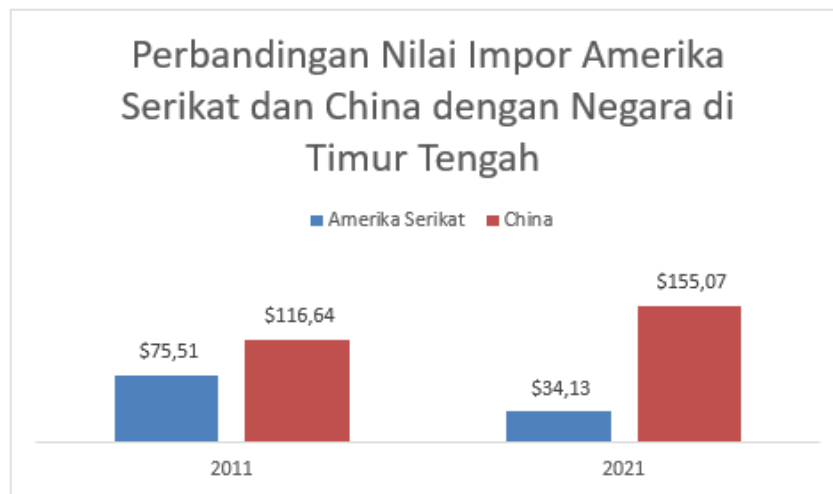
China telah menjalin kerja sama ekonomi yang erat dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Sejak tahun 2017, China bahkan telah menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai mitra dagang terbesar bagi kawasan ini. Hubungan tersebut terus diperkuat dalam tahun-tahun berikutnya. Salah satu bentuk komitmen China terhadap kawasan terlihat dalam penyelenggaraan *The 8th Ministerial Meeting of the China-Arab States Cooperation Forum (CASCF)* yang dilangsungkan pada 10 Juli 2017 di Beijing, di mana China mengundang 22 negara anggota Liga Arab. Dalam forum ini, China berkomitmen memberikan pinjaman sebesar 20 miliar dolar AS untuk mendanai proyek infrastruktur, serta bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi senilai 90,6 juta dolar AS bagi negara-negara yang terdampak konflik seperti Suriah, Yaman, Yordania, dan Lebanon. Selain itu, China juga menyediakan pinjaman khusus guna mendukung pengembangan sektor keuangan (Zhou, 2018). Besarnya komitmen bantuan dan investasi ini menjadi argumentasi kunci mengapa Arab Saudi dan Iran memberikan kesempatan bagi China untuk berperan sebagai mediator. Melalui dukungan ekonomi yang masif, China berhasil membangun kepercayaan regional dan menunjukkan bahwa stabilitas Timur Tengah merupakan kepentingan strategisnya untuk melindungi investasi jangka panjang (Zhou, 2018). Pendekatan ini memperkuat citra China sebagai aktor netral yang mengedepankan kemakmuran bersama tanpa ambisi penguasaan wilayah, sehingga kedua negara merasa lebih aman dan yakin untuk menempuh jalur diplomasi di bawah naungan Beijing dibandingkan melalui aktor Barat (Al Tamimi, 2017).

Keberhasilan China dalam memediasi perdamaian antara Arab Saudi dan Iran menjadi sebuah pencapaian diplomatik yang signifikan, sekaligus menunjukkan keunggulan strategis China dibandingkan Amerika Serikat dan negara Barat lainnya dalam konteks Timur Tengah. Peran sebagai mediator ini memberi China sejumlah keuntungan penting. Salah satunya

adalah keberhasilannya mempertemukan pejabat tinggi keamanan Iran dengan Menteri Negara sekaligus Penasihat Keamanan Nasional Arab Saudi, yang mencerminkan besarnya pengaruh diplomatik China di kawasan. Melalui pendekatan diplomasi berbasis *soft power*, China mampu mempertahankan posisi netral dan dipercaya oleh kedua belah pihak. penggunaan *soft power* ini secara konkret diwujudkan melalui diplomasi ekonomi yang agresif dan prinsip non-intervensionis, di mana China tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain sehingga membangun kepercayaan politik yang kuat (Yulianti & Affandi, 2018). China menggunakan kekuatan ekonominya sebagai instrumen strategis, seperti pemberian komitmen investasi senilai \$65 miliar kepada Arab Saudi untuk pengembangan energi terbarukan (Mustofa, 2023) , serta perjanjian investasi jangka panjang sebesar \$400 miliar dengan Iran selama 25 tahun sebagai imbalan pasokan minyak yang stabil (Nytimes, 2021). Selain itu, pengaruh China diperkuat melalui penyediaan pinjaman infrastruktur sebesar \$20 miliar bagi negara-negara Arab dan bantuan kemanusiaan serta rekonstruksi senilai \$90,6 juta bagi wilayah yang terdampak konflik (Zhou, 2018). Strategi ini tidak hanya memperkuat posisi China sebagai mediator yang dipercaya, tetapi juga memberikan manfaat langsung terhadap kepentingan ekonomi-politik luar negeri Beijing dengan mengamankan jalur energi yang vital bagi pertumbuhan nasionalnya (Houghton, 2022).

China semakin meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah, sebuah kawasan yang sejak lama menjadi pusat kepentingan global. Melalui kebijakan ekonomi yang agresif dan investasi yang besar, China berhasil memperluas jangkauannya di kawasan ini. Salah satu faktor yang mendukung pengaruh China adalah kebutuhan Timur Tengah akan sumber daya energi yang kaya, seperti minyak dan gas alam, yang merupakan kepentingan strategis bagi China sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. China telah menjalin kemitraan dengan banyak negara Timur Tengah melalui proyek infrastruktur seperti Jalur Sutra Ekonomi, yang bertujuan memperluas konektivitas dan perdagangan regional. Selain itu, China juga memberikan dukungan ekonomi dan politik kepada beberapa negara di Timur Tengah, dengan memberikan pinjaman dan investasi yang signifikan. Hal ini membantu memperkuat hubungan China dengan negara-negara di kawasan tersebut. Meskipun pengaruh China masih tidak sekuat Amerika Serikat, China terus mengejar pengaruhnya di Timur Tengah melalui diplomasi ekonomi yang cermat dan strategi kebijakan yang cerdas. Hal ini menunjukkan bahwa China ingin memainkan peran yang lebih besar dalam dinamika politik dan ekonomi di Timur Tengah, yang berpotensi mengubah lanskap kekuatan di kawasan tersebut.

Gambar 1.3 Perbandingan Nilai Impor Amerika Serikat dan China dengan Negara di Timur Tengah (Dalam Milyar)



Sumber : OEC World dan olahan data Penulis

Gambar 1.4 Perbandingan Nilai Ekspor Amerika Serikat dan China dengan Negara di Timur Tengah (Dalam Milyar)



Sumber : OEC World dan Olahan data Penulis

Pada **Gambar 1.4** Nilai Transaksi Ekspor Negara Timur Tengah ke China pada tahun 2021 mencapai \$135 Milyar meningkat sebesar 62,7% dibanding tahun 2011 yakni sebesar \$83 Milyar. Berbanding terbalik dengan Amerika Serikat yang mengalami penurunan 9,8% selama 10 tahun terakhir dari \$46,64 Milyar di tahun 2011 menjadi \$42,06 Milyar pada tahun

2021. Sementara itu **Gambar 1.3** Nilai Transaksi Impor Timur Tengah dari China juga mengalami kenaikan yang signifikan dari \$116,64 miliar pada tahun 2011 menjadi \$155,07 miliar di tahun 2021 atau meningkat sebesar 33%. Hal yang sama pada transaksi ekspor, nilai transaksi Impor Timur Tengah dari Amerika Serikat juga mengalami penurunan dari \$75,51 miliar pada tahun 2011 menjadi \$34,13 miliar di tahun 2021. Jika dibandingkan total nilai perdagangan pada tahun 2021, nilai transaksi perdagangan China dengan Timur Tengah mencapai \$290,07 miliar atau hampir 4 kali lipat dari nilai perdagangan Amerika Serikat dengan Timur Tengah pada tahun yang sama.

Skala ekonomi yang masif ini menginterpretasikan bahwa hubungan Timur Tengah dengan China kini memiliki nilai strategis yang jauh lebih menjanjikan dibandingkan dengan Amerika Serikat, sehingga menempatkan China sebagai mitra utama bagi masa depan kawasan. Hal ini diperkuat oleh posisi China sebagai mitra dagang terbesar Arab Saudi dengan nilai transaksi bilateral mencapai \$77,7 miliar pada tahun 2021, di mana ekspor Arab Saudi ke China sendiri telah melonjak hingga \$48,7 miliar. Sebaliknya, meskipun Amerika Serikat tetap menjadi mitra penting, hubungannya dengan Arab Saudi lebih banyak terkonsentrasi pada sektor industri pertahanan, infrastruktur, dan investasi.

Kontribusi China di Timur Tengah

Hubungan antara China dan negara-negara di kawasan Timur Tengah memiliki keterkaitan erat dengan inisiatif ambisius *Belt and Road Initiative* (BRI) yang diluncurkan oleh China pada tahun 2013. Proyek BRI merupakan program besar yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan arus perdagangan di kawasan Asia dan wilayah sekitarnya, meniru konsep jalur sutra kuno. Di samping itu, pendekatan China terhadap Timur Tengah juga didorong oleh upayanya memperkuat posisi strategis dalam hal keamanan energi. Kebutuhan akan pasokan energi—terutama minyak dan gas—merupakan bagian vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional negara tersebut (DIIS, 2015). Dalam konteks ini, BRI tidak hanya mendorong kerja sama perdagangan dan konektivitas global, namun juga berupaya membangun sistem ekonomi yang berada di luar pengaruh dominan Amerika Serikat (Lons et al., 2019).

China memanfaatkan kekuatan ekonominya sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang selaras dengan pendekatan *soft power*. Peningkatan intensitas kerja sama ekonomi China di kawasan Timur Tengah ditujukan untuk membuka pasar baru, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur dan jaminan keamanan energi (Guzansky dan Lavi, 2020).

Ketergantungan terhadap energi, terutama minyak, telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi China yang pesat. Arab Saudi, sebagai salah satu negara produsen minyak terbesar, secara konsisten menjadi mitra utama penyedia minyak bagi China, bersaing dengan Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan volume impor minyak mentah dari Arab Saudi yang mencapai 56,73 juta ton pada tahun 2018, atau berkisar antara 1,6 hingga 1,7 juta barel per hari. Kedekatan ekonomi ini juga tercermin dari nilai ekspor Arab Saudi ke China yang melonjak signifikan menjadi \$48,7 miliar pada tahun 2021, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar \$25,6 miliar. Dengan kepemilikan cadangan minyak mencapai 267 miliar barel atau sekitar 16 persen dari total cadangan dunia, Arab Saudi memiliki posisi tawar yang tak tergantikan dalam memenuhi kebutuhan energi China. Pasokan ini menjadi sangat vital mengingat konsumsi minyak harian China telah meningkat signifikan menjadi sekitar 14,5 juta barel per hari pada tahun 2019. Sebagai kekuatan minyak global, peran Arab Saudi tidak mengejutkan, mengingat cadangan minyaknya yang mencapai 267 miliar barel atau sekitar 16 persen dari total cadangan minyak dunia, menjadikannya sebagai pemilik cadangan minyak terbesar kedua secara global (Fulton, 2020).

Negara-negara Timur Tengah memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan energi China, khususnya minyak bumi. Pada tahun 2000, konsumsi minyak harian China tercatat sebesar 4,8 juta barel, dan meningkat signifikan menjadi sekitar 14,5 juta barel per hari pada tahun 2019. Seiring dengan itu, China juga menunjukkan ketertarikan dalam diversifikasi sumber energi dengan meningkatkan impor gas alam. Pada tahun 2013, lebih dari separuh kebutuhan minyak China diimpor dari kawasan Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Arab Saudi menjadi pemasok utama minyak bagi China. Dari sudut pandang energi, kawasan Timur Tengah memiliki posisi yang semakin strategis dalam kalkulasi kebijakan luar negeri Beijing. Selain minyak dan gas, kawasan ini juga menjadi sumber penting bagi bahan baku kimia yang mendukung sektor manufaktur China dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonominya (Houghton, 2022).

China merupakan salah satu negara pengimpor utama minyak bumi dan gas alam dari kawasan Timur Tengah. Ketergantungan China terhadap sumber energi dari wilayah ini diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi domestik untuk mendukung ekspansi sektor industri nasional. Selama ini, China menerapkan strategi yang cermat dan seimbang dalam mengelola impor energi dari Timur Tengah. Namun, hubungan erat antara Arab Saudi dan Amerika

Serikat menimbulkan kekhawatiran bagi China, mengingat potensi intervensi Amerika Serikat dalam memengaruhi kebijakan ekspor energi Arab Saudi terhadap China. Dalam konteks ini, Iran muncul sebagai mitra strategis yang signifikan karena dinilai lebih tahan terhadap tekanan geopolitik dari Amerika Serikat. Ketahanan ini diperkuat oleh komitmen investasi jangka panjang China di Iran yang mencapai \$400 miliar selama 25 tahun, yang membantu Iran mengatasi tekanan ekonomi global. Oleh karena itu, kepentingan ekonomi China terhadap Arab Saudi dan Iran sangat besar, terutama dalam hal akses terhadap cadangan energi seperti minyak dan gas alam yang melimpah di kawasan tersebut. Sumber daya ini berperan vital dalam mendukung implementasi inisiatif *Belt and Road* (BRI) yang bertujuan memperkuat integrasi dan konektivitas perdagangan di Asia dan sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa China memandang Arab Saudi dan Iran sebagai aktor kunci dalam strategi energi dan ekonomi jangka panjangnya. Atas dasar kepentingan strategis inilah, China mengambil sikap proaktif dalam mendorong pemulihan hubungan diplomatik antara kedua negara guna menjaga stabilitas kawasan serta memperkuat peran kepemimpinan globalnya di Timur Tengah. Atas dasar kepentingan ini, China mengambil sikap proaktif dalam mendorong pemulihan hubungan diplomatik antara kedua negara, guna menjaga stabilitas kawasan serta memperkuat peran strategisnya di Timur Tengah.

China juga turut berperan aktif dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara di Timur Tengah yang tengah dilanda konflik. Sebagai contoh, China mengirim sekitar 2.000 tenaga medis ke Yaman guna membantu membenahi layanan kesehatan masyarakat di sana. Selain itu, China menyalurkan bantuan dana sebesar \$7,62 juta untuk Palestina dan \$34,5 juta untuk mendukung Suriah, Yordania, Lebanon, Libya, serta Yaman. Bantuan-bantuan ini memperkuat citra China sebagai negara yang tidak memiliki ambisi untuk menguasai kawasan Timur Tengah (Al Tamimi, 2017). Di samping itu, China memainkan peran sebagai pihak netral dan penyeimbang dalam berbagai konflik regional, meskipun tetap menjadikan kepentingan ekonomi dan perdagangan sebagai orientasi utamanya. Misalnya, dalam perselisihan antara Qatar dan negara-negara seperti Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, serta Mesir, China memberikan dukungan kepada Qatar untuk mengatasi tekanan ekonomi yang ditimbulkan akibat konflik tersebut.

China terakhir kali memainkan peran sebagai mediator dalam konflik antara Arab Saudi dan Qatar pada tahun 2017. Dalam upayanya meredakan ketegangan, China mempertemukan kedua pihak dalam forum *China–Arab States Cooperation Forum* (CASCF) yang diselenggarakan di Beijing. Pada saat yang bersamaan, China juga menjadi pendukung

utama bagi Qatar dalam menghadapi embargo ekonomi yang diberlakukan oleh Arab Saudi dan negara-negara sekutunya. Dampak dari embargo tersebut terlihat dalam peningkatan signifikan hubungan dagang: ekspor China ke Qatar naik sebesar 36%, sementara ekspor Qatar ke China melonjak hingga 60%. Kini, China telah mengambil alih posisi Amerika Serikat sebagai mitra utama impor bagi Qatar (Chowdhury, 2018). Secara historis, hubungan antara China dan negara-negara di Timur Tengah relatif bebas dari konflik serius sejak berakhirnya Perang Dunia II, berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki rekam jejak hubungan bermasalah dengan sejumlah negara di kawasan tersebut.

Mengukur Keberhasilan dalam Implementasi Perdamaian Arab Saudi – Iran

Keberhasilan China sebagai mediator perdamaian antara Arab dan Saudi menunjukkan keseriusan China dalam melakukan intervensi perdamaian. Dalam konteks konflik antara Arab Saudi dan Iran, China memanfaatkan posisinya sebagai salah satu mitra dagang strategis bagi Arab Saudi maupun Iran untuk melakukan pendekatan terhadap kedua negara. Strategi tersebut semakin menjelaskan bahwa apa yang dilakukan China melalui pendekatan yang menekankan strategi *soft power*. Hal ini diperkuat dengan nilai neraca perdagangan China dengan Arab Saudi dan Iran semakin meningkat. Dengan melihat kawasan Timur Tengah khususnya Arab Saudi dan Iran sebagai upaya menjalankan proyek BRI semakin memperkuat strategi pendekatan secara ekonomi yang dilakukan oleh China alih-alih menggunakan kekuatan militer secara langsung.

Keseriusan China dalam intervensi perdamaian memperkuat posisi geopolitik dan legitimasi global China tanpa konfrontasi terbuka. China yang semakin mendominasi di kawasan Timur Tengah lewat nilai neraca perdagangannya semakin meningkat mengalahkan dominasi Amerika Serikat. Jika dibandingkan dengan pendekatan konfrontasi militer oleh Amerika Serikat di Timur Tengah, China lebih mengedepankan cara – cara diplomasi yang didukung dengan pengaruh ekonomi China di Timur Tengah. Keterlibatan China dalam proses ini mencerminkan upaya strategis untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Timur Tengah melalui cara-cara damai, sekaligus menandakan transformasi peran China dari sekadar kekuatan ekonomi menjadi aktor kunci dalam arsitektur perdamaian global berbasis *soft power*.

KESIMPULAN

Dalam konflik yang telah berlangsung selama beberapa periode antara Arab Saudi dan Iran, Strategi *Soft Power* China telah berhasil memainkan peran mediator yang signifikan dalam upaya mencapai perdamaian dengan menggunakan. Melalui penelitian ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting keberhasilan Strategi *Soft Power* China sebagai mediator perdamaian antara Iran dengan Arab Saudi.

Pertama, hubungan yang baik dengan Arab Saudi dan Iran telah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan China sebagai mediator. Kemitraan ekonomi yang kuat yang telah dibangun oleh China dengan kedua negara ini, terutama posisi China sebagai tujuan utama ekspor minyak bagi Arab Saudi dan Iran memberikan fondasi yang solid untuk membangun kepercayaan serta memfasilitasi dialog antara mereka.. Kedua, kapasitas pengaruh China yang kuat dalam hal politik dan ekonomi di Timur Tengah telah membantu mencapai keberhasilan sebagai mediator. Kapasitas ini secara spesifik dibuktikan oleh rekam jejak China dalam meredakan ketegangan antara Arab Saudi dan Qatar pada tahun 2017 melalui forum *China–Arab States Cooperation Forum* (CASCF) di Beijing. Selain itu, posisi China sebagai mitra dagang terbesar yang telah menggantikan dominasi Amerika Serikat sejak 2017, serta perannya sebagai salah satu investor utama di kawasan tersebut, memberikan daya tawar diplomatik yang signifikan. Pasca perang dingin telah banyak upaya yang telah dilakukan China untuk membangun hubungan baik dengan negara - negara Timur Tengah terutama dalam memberikan bantuan dan menyelesaikan konflik. Hal ini sejalan juga dengan menurunnya pengaruh Amerika Serikat yang sempat menguat pasca perang dingin. Ketiga , kepentingan strategis China dalam memediasi konflik ini juga telah menjadi faktor penentu. Stabilitas di Timur Tengah sangat penting bagi China karena ketergantungan mereka pada sumber daya energi dari wilayah tersebut. China sangat bergantung pada pasokan minyak mentah dari Arab Saudi dan juga China menjadi negara tujuan utama ekspor dari Iran. Sebagai mediator, China dapat memastikan kelangsungan pasokan energi yang stabil dan mempromosikan stabilitas regional yang lebih luas.

Meskipun pengaruh China masih tidak sekuat Amerika Serikat, China terus mengejar pengaruhnya di Timur Tengah lewat strategi *soft Power* dengan melakukan diplomasi ekonomi yang cermat dan strategi kebijakan yang cerdas. Hal ini menunjukkan bahwa China ingin memainkan peran yang lebih besar dalam dinamika politik dan ekonomi di Timur Tengah, yang berpotensi mengubah lanskap kekuatan di kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Tamimi, J. (2017). China uses soft power to woo Arab world. *Dalam* <https://gulfnews.com/world/mena/china-uses-soft-power-to-woo-arab-world-1.2105970> [diakses 20 Oktober 2024].
- Alterman, J. B. (2019). Chinese and Russian influence in the Middle East. *Middle East Policy*, 26(2), 129-136.
- Aydemir, S. (2024). Crucial yet Limited: China's Role in the Saudi-Iranian Rapprochement. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*.
- Chowdhury, D. R. (2018). China a pillar of strength in Qatar's fightback against Arab blockade. *Dalam: <https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2149915/china-pillar-strength-qatars-fightback-against-arab-blockade>*. [diakses 15 November 2018].
- Chen, Q. (1993). New Approaches in China's Foreign Policy: The Post-Cold War Era. *Asian Survey*, 33(3), 237-251.
- Eslami, M., & Papageorgiou, M. (2023). China's Increasing Role in the Middle East: Implications for Regional and International Dynamics. *Georgetown Journal of International Affairs*.
- Fassihi, F., & Myers, S. L. (2021, 27 Maret). *China and Iran Sign 25-Year Cooperation Agreement*.
- The New York Times. <https://www.nytimes.com/2021/03/27/world/middleeast/china-iran-deal.html>
- Grumet, T. R. (2015). *New Middle East Cold War: Saudi Arabia and Iran's Rivalry* (Doctoral dissertation, University of Denver).
- Houghton, B. (2022). China's Balancing Strategy between Saudi Arabia and Iran: The View from Riyadh. *Asian Affairs*, 53(1), 124-144.
- Karimah, Annisa. 2017. Kebijakan Indonesia Dalam Menengahi Konflik Arab Saudi-Iran Dalam Kasus Eksekusi Mati Nimr Al-Nimr. Skripsi Ilmu Hubungan Internasional: Fakultas ISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Lons, C., Fulton, J., Sun, D., & Tamimi, N. A. (2019). China's Great Game in the Middle East. *Policy Brief*, 1-33.
- Maulana, M. S. (2018). Persaingan Kekuatan Saudi Arabia (Sunni) Dan Iran (Syiah) Pada Kasus Konflik Kontemporer (Suriah Dan Yaman). *Jurnal Gama Societa*, 2(2), 101-110.

- Mustofa, A. Z. (2023). Kepentingan China sebagai Aktor di Balik Rekonsiliasi Hubungan Arab Saudi dan Iran. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 253-268.
- Nye Jr, J. S. (2008). Public diplomacy and soft power. *The annals of the American academy of political and social science*, 616(1), 94-109
- Rahman, M. A. (2023, 11 Maret). *Kisah Peran China di Balik Rekonsiliasi Arab Saudi-Iran*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/kisah-peran-china-di-balik-rekonsiliasi-arab-saudi-iran>
- Ramadhan, R. B. (2019). Pengaruh Peningkatan Kekuatan Iran Terhadap Hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 19(1), 111-126.
- Putra, R. P., Jamilah, M., & Irawan, P. (2020). Intervensi Militer Arab Saudi Terhadap Konflik Yaman Untuk Membendung Pengaruh Iran Di Timur Tengah. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 4(1), 76-100.
- Yulianti, D., & Affandi, R. M. T. N. (2018). Strategi Soft Power Dalam Ekspansi Ekonomi China Di Timur Tengah: Studi Kasus Kerjasama China-Iran. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1(2), 247-265.
- The Observatory of Economic Complexity. *China (CHN) and Iran (IRN) Trade*. OEC World. <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/chn/partner/irn>
- The Observatory of Economic Complexity. *China (CHN) and Saudi Arabia (SAU) Trade*. OEC World. <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/chn/partner/sau>
- Yulianti, D., & Affandi, R. M. T. N. (2018). *Strategi Soft Power Dalam Ekspansi Ekonomi China Di Timur Tengah: Studi Kasus Kerjasama China-Iran*. Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 1(2), 247-265.